



PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR 676/VII/TAHUN 2024

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Rencana Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

- 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan berdasarkan usulan Perangkat Daerah/ Unit Kerja untuk ditindaklanjuti bersama pada Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Dalam hal tertentu yang dipandang perlu dan mendesak untuk kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah dapat mengajukan Rancangan Peraturan Kepala Daerah meskipun tidak termasuk dalam agenda Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang pelaksanaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Perangkat Daerah/ Unit Kerja pengusul atau terkait langsung secara substansi dengan agenda Rencana Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah tersebut, agar segera mempersiapkan pembahasan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan mengoordinasikan bersama dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dengan melibatkan Tenaga Ahli/Unsur terkait lainnya yang dipandang perlu, dan memperhatikan tahapan/ mekanismenya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dibebankan pada DPA-Perangkat Daerah/ Unit Kerja Pemrakarsa dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun Anggaran 2024 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 243/III/SEKDA/TAHUN 2024 tentang Penetapan Rencana Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Catatan :
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

KETUJUHAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 10 Juli 2024

an.GUBERNUR SULAWESI SELATAN
Plh. SEKRETARIS DAERAH,

£

ANDI DARMAWAN BINTANG

- Tembusan:
1. Gubernur Sulawesi Selatan;
 2. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri;
 3. Para Kepala Perangkat Daerah dan Biro Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
 4. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 676/VII/TAHUN 2024
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

No (1)	TENTANG (2)	MATERI POKOK (3)	STATUS (4)		PELAKSANAAN (5)	PD/Unit Kerja (6)	TARGET PENYAMPAIAN (7)	KET (8)
			BARU	UBAH				
1	Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan	Standar Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan	v			BPSDM	2024	
2	Pedoman Penetapan Pembayaran Honorarium Diberikan Atas Kelebihan Jumlah Minimal Jam Tatap Muka Bagi Jabatan Fungsional Widyaiswara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	Honorarium Atas Kelebihan Jumlah Minimal Jam Tatap Muka Bagi Jabatan Fungsional Widyaiswara	v			BPSDM	2024	
3	Pola Tata Kelola, Rencana Strategis, dan Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Provinsi Sulawesi Selatan		v			DPLH	2024	
4	Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum	Pedoman dalam pengelolaan JDIH di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	v			Biro Hukum	2024	
5	Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi	Pedoman dalam pengelolaan transfer anggaran berbasis ekologi	v			Bappelibangda	2024	



Catatan :
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

6	Rencana Tanah Longsor Provinsi Sulawesi Selatan	Penetapan rencana penanggulangan bencana tanah longsor	v			BPBD	2024	
7	Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang	Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah	v			DP3A	2024	
8	Pedoman Penetapan Indeks “K” dan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra	Perubahan harga pembelian tandan buah segar dan kelapa sawit		v		Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan	2024	
9	Klasifikasi Arsip	Perubahan kode klasifikasi		v		Dinas Kearsipan	2024	
10	Kajian Risiko Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Dokumen kajian resiko bencana daerah	v			BPBD	2024	
11	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah		v			Inspektorat	2024	
12	Jadwal Retensi Arsip	Pedoman penetapan jadwal retensi arsip	v			Dinas Kearsipan	2024	
13	Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	Pedoman dalam penilaian perusahaan dalam memerhatikan lingkungan hidup	v			DPLH	2024	
14	Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas	Pelaksanaan Peraturan Menteri	v			BKAD	2024	
15	Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Wilayah Kawasan Mamminasata di Provinsi Sulawesi Selatan	Pemanfaatan ruang wilayah kawasan Mamminasata	v			DPUTR	2024	
16	Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) di Provinsi Sulawesi Selatan	Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang	v			DPUTR	2024	
17	Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang di Prov. Sulsel	Pedoman penyelesaian sengketa penataan ruang	v			DPUTR	2024	



-Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

18	Perangkat Pengendalian Kawasan Wisata dan Olahraga Terpadu Barombong Kota Makassar	Kawasan wisata dan olahraga terpadu Barombong	v			DPUTR	2024	
19	Perangkat Pengendalian Kawasan Wisata Pantai dan Air Pulau Lae-Lae Kota Makassar	Kawasan wisata pantai dan air Pulau Lae-Lae	v			DPUTR	2024	
20	Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat		v			Badan Pendapatan Daerah	2024	
21	Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah			v		BKAD	2024	
22	Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 147 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD			v		BKAD	2024	
23	Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.			V		BKAD	2024	
24	Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) di Lingkup Prov. Sulsel		v			Dinas Perpustakaan dan Arsip Dinamis	2024	
25	Pemanfaatan Pajak Rokok		v			Bapenda	2024	
26	Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi		v			Bappelitbangda	2024	

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code



27	Penugasan Kepada Perusahaan Daerah PT. Sulsel Citra Indonesia (Perseroda)		v			Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	2024	
28	Alokasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2025		v			Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	2024	
29	Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Alat Berat dan Pajak Air Permukaan		v			Badan Pendapatan Daerah	2024	
30	Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok		v			Badan Pendapatan Daerah	2024	
31	Kode Etik Aparat Pengawasan Internal Pemerintah		v			Inspektorat	2024	
32	Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah			v		BKAD	2024	
33	Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 135 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan			v		Disnakertrans	2024	
34	Pedoman Penatausahaan Barang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan		v			BKAD	2024	
35	Penanggulangan Krisis Kesehatan di Daerah		v			Bappelitbangda	2024	
36	Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama		v			Badan Pendapatan Daerah	2024	



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

37	Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		v			Badan Pendapatan Daerah	2024	
38	Pedoman Pembagian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Selatan		v			Badan Pendapatan Daerah	2024	
39	Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah			v		BKAD	2024	
40	Pencabutan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kelas Jabatan		v			Biro Organisasi	2024	
41	Pola Tata Kelola, Rencana Strategis, dan Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Tanaman Pangan		v			TPH Bun	2024	
42	Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2024-2025		v			Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	2024	
43	Pedoman Pengadaan Tenaga Profesional Lainnya dan Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Non Rumah Sakit		v			Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	2024	
44	Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Profesional Lainnya dan Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah			v		Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	2024	
45	Revisi Wilayah Pengelolaan Hutan		v			DLHK	2024	
46	Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi		v			DLHK	2024	
						DLHK	2024	



Catatan :
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

48	Percepatan Perhutanan Sosial		v			DLHK	2024	
49	Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah		v			DLHK	2024	
50	Pencabutan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 54 Tahun 2023 tentang Sewa Kendaraan Dinas		v			BKAD	2024	
51	Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2024-2026		v			Bappelitbangda	2024	
52	Pengelompokkan Koordinasi Asisten Sekretariat Daerah terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah		v			Biro Organisasi	2024	
53	Pola Tata Kelola, Rencana Strategis, dan Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Transfusi Darah		v			Dinas Kesehatan	2024	
54	Subsidi Harga dan Fasilitasi Distribusi Pangan Pokok Strategis dalam Rangka Pengendalian Inflasi		v			Dinas Ketahanan Pangan	2024	
55	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengembangan Pertanian Organik		v			Dinas Ketahanan Pangan	2024	
56	Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara secara Terintegrasi		v			BPSDM	2024	
57	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah			v		BKAD	2024	



Catatan :
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

58	Pemberian Beasiswa		v			BKD	2024	
59	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan untuk Menunjang Kegiatan Usaha, dan Non Perizinan			v		DPMPTSP	2024	
60	Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengoordinasian Tugas dan Fungsi Asisten Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan		v			BIRO ORGANISASI	2024	

an. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
Plh. SEKRETARIS DAERAH,

§

ANDI DARMAWAN BINTANG



Catatan :
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*